

MEMANDANG KONFLIK PERTAMINA VI BALONGAN MELALUI *CONTENTIOUS POLITICS: REPERTOAR* WARGA BALONGAN SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK

Beta Puspitaning Ayodya, S.Sos, M.A,
Dewi Sri Andika Rusmana, S.I.Kom, M.Med.Kom
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
betaayodya@gmail.com dewirusmana11@gmail.com,

Abstraksi

Konflik yang terjadi di Desa Majakerta merupakan ketegangan yang sifatnya merata dan dinamis karena dipengaruhi oleh intrik kepentingan masing-masing kelompok. Baik itu antar masyarakat, antara masyarakat dengan tokoh masyarakat, antara tokoh masyarakat dengan pemerintah, dengan pihak PT Pertamina VI Balongan, maupun antar pemerintah itu sendiri. Penyebab adanya konflik tersebut adalah adanya pendistribusian bantuan maupun program yang tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat. Disitulah muncul peluang yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mencari keuntungan. Memandang konflik yang terjadi di Balongan melalui *Contentious Politics* dapat dilihat ketika terdapat peluang yang diperebutkan banyak pihak, yaitu berupa dana bantuan CSR yang akan dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari PT Pertamina VI Balongan. Perebutan peluang tersebut oleh berbagai pihak, baik itu masyarakat, tokoh masyarakat, Pemdes dan Pemkab membuat konflik yang terjadi semakin bertambah kompleks. Perguliran wacana dan isu yang berkembang dalam masyarakat pun membuat eskalasi konflik semakin membesar, dan dimanfaatkan beberapa oknum untuk memobilisasi massa sehingga terjadi pergerakan. Konflik yang terjadi tersebut dilihat melalui teori *Contentious Politics* dengan menggunakan *repertoar* untuk melihat bagaimana fenomena yang terjadi di Desa Majakerta. Melalui *repertoar* tersebut bisa terlihat bahwa eskalasi konflik di Desa Majakerta semakin membesar, yang terlihat dari perseteruan yang terkoordinasi meningkat, yang mengakibatkan perseteruan yang melibatkan aktor-aktor yang lebih luas dan yang menjembatani klaim-klaim mereka dengan identitas-identitas mereka.

Kata Kunci: Konflik, Balongan, *Contentious Politics*, *Repertoar*

Pendahuluan

Eskalasi konflik masyarakat dengan perusahaan tambang semakin mencuat pasca runtuhnya rezim Ode Baru. Iklim demokrasi yang membuka ruang penguatan peran masyarakat terhadap negara dalam pembuatan kebijakan maupun program pembangunan yang tidak jarang menimbulkan friksi, ketegangan dan konflik yang menyangkut klaim bagi hasil maupun kepemilikan terhadap sumberdaya alam. Kondisi ini tidak terlepas dari

perubahan bangunan konstruksi sosial di dalam masyarakat bahwa SDA di daerahnya sebagai aset publik dan juga sebagai aset komunal untuk kesejahteraan mereka.¹⁴⁰ Argumen inilah yang kemudian digunakan untuk menekan perusahaan dan negara yang dipandang tidak memberikan aspek kemanfaatan langsung kepada masyarakat yang dulunya sebagai “pemilik” lahan, berada di sekitar tempat tinggalnya dan juga berada dekat dengan sumber penghidupannya. Fenomena ini yang kemudian menggambarkan bagaimana terjadinya konflik sosial antara warga Majakerta dengan Pertamina Revenery 6 Indramayu saat ini.

Konflik yang saat ini terjadi dimulai dengan adanya moment yaitu dikeluarkannya UU oleh pemerintah No 40 Tahun 2007 khususnya pasal 74 ayat 1,2,3 dan 4. Secara spesifik pasal ini mewajibkan perusahaan yang bidang usahanya terkait sumberdaya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab ini sering diistilahkan dengan term CSR (*Corporate Social Responsibility*). CSR menjadi salah satu isu yang kemudian mencuat di tengah-tengah warga Majakerta karena tidak terlepas dari klaim masyarakat bahwa dampak yang diberikan Pertamina pasca beroperasi sejak tahun 1990 awal tidak pernah dirasakan warga. Masih banyak warga yang terhimpit kemiskinan, rawan terdampak penyakit (terpapar aktivitas industri), sumber pendapatan yang terbatas, akses pekerjaan warga di Pertamina hanya sebatas buruh atau pegawai rendahan, dan minimnya bantuan sosial maupun perbaikan lingkungan.¹⁴¹

Adanya ketentuan perusahaan untuk memberikan CSR menjadi peluang yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh elit lokal Majakerta untuk menekan Pertamina. CSR yang diberikan kemudian berusaha didorong untuk memberikan pemenuhan “kebutuhan” warga yang selama ini luput dari perhatian secara serius dari pemerintah. Terlebih muncul perdebatan warga dengan pemerintah daerah Indramayu menyangkut dana CSR yang

¹⁴⁰ Frans de Djalong, 2010. “Konflik Pertambangan: Mengelola Paradok (Perspektif Demokrasi Politik)”. *Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian*. Yogyakarta: PSKP Universitas Gadjah Mada

¹⁴¹ Keluhan warga Majakerta sebelum ada CSR kepada Pertamina dan pemerintah daerah Indramayu. Dalam Laporan Sosial Mapping Jurusan PSdK Fisipol UGM Tahun 2013.

diberikan oleh Pertamina sebesar Rp 15 miliar. Pandangan dari pemerintah uang tersebut berhak diberikan kepada warga Indramayu. Namun menurut warga Majakerta mereka berhak untuk menerima anggaran yang lebih besar karena berada pada ring satu yang merasakan dampak nyata dari kegiatan industri Pertamina Revenary 6. Perbedaan cara pandang ini kemudian disikapi oleh warga Majakerta dengan melakukan beberapa aksi pemblokiran akses terhadap Pertamina. Tindakan ini merupakan salah satu letupan kecil apa yang terjadi di Kecamatan Balongan khususnya Majakerta menyangkut persoalan CSR yang memberikan warna konflik sosial warga dengan perusahaan dan pemerintah.

Beberapa bentuk ketegangan dalam lingkup persoalan sosial di Majakerta ini yang kemudian menjadi ketertarikan dari penulis untuk melacak pola-polanya yang sekiranya bisa memberikan gambaran bagaimana bentuk konflik sosial yang menyangkut CSR dari perusahaan tambang. Pola ini kemudian akan dijelaskan dengan menggunakan pendekatan *contentious politic*. Teori ini digunakan untuk menganalisa adanya perseteruan baik yang bersifat laten maupun terbuka dalam konflik sosial yang terjadi di luar batas politik formal dan bisa mencakup protes-protes yang diwarnai dengan kekerasan.¹⁴² Dengan kondisi sistem politik yang lebih terbuka saat ini menyebabkan banyak daerah di Indonesia kemudian mengalami fenomena ketegangan politik dimana-mana. Kondisi ini dapat dilihat dari temuan Garry Van Klinken yang menganalisa ketegangan dengan kekerasan komunal terjadi dalam sistem transisi demokrasi di Indonesia yang dilatarbelakangi persoalan adat, agama, etnis dan lingkungan. Sehingga penulis disini mencoba menguraikan ketegangan yang terjadi antara warga, pemerintah daerah dan perusahaan dalam konteks implementasi CSR di ranah praksis yang mengalami banyak implikasi langsung terhadap relasi ketiga aktor di atas.

Dari kompleksitas yang melatarbelakangi intrik CSR di Majakerta tersebut, penulis ingin mengajukan pertanyaan penelitian bagaimanakah kontentius politik yang terjadi

¹⁴² Gerry Van Klinken, 2007. *Perang Kota Kecil : Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 17

pasca berlakunya UU oleh pemerintah No 40 Tahun 2007 dalam pengelolaan CSR Pertamina di Majakerta? Dengan rumusan masalah tersebut selanjutnya penulis selanjutnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat sumber pemicu konflik yang berkembang dan bentuk ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam relasi ketiga aktor di atas. Lewar tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengembangan teori kontentius politik dalam khazanah problematika transisi demokrasi dan konflik sosial di ranah lokal di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Konsep *contentious politics* telah dikembangkan dalam beragam kajian politik yang mendalam.¹⁴³ Charles Tilly dan Sidney Tarrow (2007) menyatakan bahwa *contentious politics* merupakan persoalan tuntutan yang melibatkan dua pelaku, yaitu pembuat tuntutan dan penerima tuntutan atas kepentingan satu sama lain. Para aktor yang saling mengajukan tuntutan ini menggunakan jalur institusional dan extrainstitusional untuk memperkuat tuntutan terhadap kepentingan masing-masing yang formatnya bervariasi berdasarkan ruang dan waktu. Persoalan tuntutan ini dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti perdebatan seputar tontonan televisi hingga ke hal-hal yang besar seperti perebutan kekuasaan.

Sementara itu, Gerry van Klinken (2007) menyatakan bahwa *contentious politics* merupakan politik perseteruan yang terjadi hingga keluar batas politik formal dan bahkan menggunakan kekerasan. Pola *contentious politics* ini ada yang bersifat relasional, menyangkut lingkungan, dan juga menyangkut kesadaran. Masalah-masalah seperti identitas kelompok dan patron-klien dapat diuraikan melalui pola *contentious politics* yang terjadi. Adapun proses-proses yang terjadi dalam *contentious politics* ini dapat dikategorikan menjadi lima:

¹⁴³ Diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id/in/kegiatan/tahun-2010/355-seminar-intern-kontestasi-abangan-santri-pasca-orde-baru-di-desa-ngandong-gantiwarno-klaten-.html>.

Pertama, pembentukan identitas. Hal ini berkaitan dengan bagaimana identitas komunal dapat terjadi pada suatu kelompok sehingga mampu menciptakan tindakan kolektif. *Kedua*, eskalasi konflik. Hal ini merujuk pada situasi di mana konflik yang semula kecil kemudian meningkat intensitasnya sehingga melibatkan isu dan aktor yang semakin banyak. *Ketiga*, polarisasi. Hal ini terjadi ketika ruang politik antara pihak-pihak yang berseteru semakin meluas ketika keduanya berada pada titik yang ekstrim dan tidak ada suatu pihak yang menduduki posisi yang moderat. *Keempat*, mobilisasi. Hal ini ditandai dengan pola ketika orang atau kelompok yang pada awalnya bersikap apatis namun dapat digerakkan untuk ikut serta dalam suatu gerakan. Dan *kelima*, pembentukan aktor. Hal ini ditandai dengan situasi di mana suatu kelompok yang semula bersikap apolitis dan tidak terorganisir namun dapat berkembang menjadi aktor politik tunggal.

Metodologi

Dalam perkembangan studi gerakan sosial terdapat beberapa pengembangan logika teori diantaranya yaitu *resource mobilization*, *political opportunity* dan *political framing*. Misalnya dalam teori *resource mobilization* gerakan sosial berkembang ketika kelompok bisa mengakumulasi modal. Pendekatan *political opportunity* menyatakan gerakan sosial bisa berjalan ketika ada kesempatan dari struktur yang ada. Sedangkan *political framing* memandang gerakan sosial terjadi ketika elit bisa membingkai sebuah persoalan publik sehingga dapat memobilisasi warga dalam prosesnya. Namun demikian dari beberapa proposisi teori ini belum bisa menjangkau perkembangan sosial apabila gerakan sosial membuat pola dengan menggunakan ketiga pendekatan secara bersamaan yaitu dimulai dari akumulasi sumberdaya, terbukanya kesempatan dan aktor yang dapat membawa frame atau wacana dalam sebuah konteks persoalan. Padahal dalam beberapa kasus yang spesifik banyak ditemukan kasus yang menggunakan tiga pendekatan sekaligus dalam prosesnya. Sehingga

beberapa pihak kemudian menggunakan ketiga pendekatan tersebut dalam menjelaskan gerakan sosial yang sifatnya kontentius (ketegangan).

Kontentius politik sendiri adalah salah satu fenomena gerakan sosial yang diwarnai terjadinya perseteruan di luar batas-batas dari politik formal.¹⁴⁴ Pendekatan kontentius politik ini mencoba menggambarkan dan mengidentifikasi adanya pola-pola dan mekanisme dalam sebuah gerakan sosial yang terjadi dalam konteks masyarakat struktur demokratis dengan membawa klaim-klaim kepentingan dari pelbagai pihak terhadap pemerintah. Klaim-klaim kepentingan dari aktor yang digunakan sebagai modalitas untuk merubah struktur kebijakan dan pola relasi politik karena telah terjadi ketimpangan kategoris, perubahan jaringan, perubahan *public politic* dan relasi warga negara dan agen pemerintah.¹⁴⁵

Pola dan mekanisme yang dikembangkan dalam kontentius politik dalam menuntut perubahan terhadap struktur sering diistilahkan sebagai repertoar yang bisa mencakup protes-protes, aksi politik, demonstrasi, aksi penyerangan, kekerasan, pembangkangan, dll dalam interaksi multi aktor yang dinamis. Pola dan mekanisme ini sangat penting untuk mengungkapkan adanya derajat persoalan dan hubungan antar aktor yang tercermin dari respon yang dilakukan terhadap struktur. Karena derajat persoalan ini imbasnya terhadap kompleksitas tarik ulur kepentingan dari subyek atau masing-masing aktor. Ketika kekuatan tidak terlalu timpang maka tarik ulur ini akan semakin kuat. Proses kuat tidaknya tarik ulur aktor ini dapat dilihat dari akumulasi sumberdaya berasal dari legalitas formal, representasi, populisme, kekuatan frame publik, penguasaan sumberdaya, relasi jaringan dan perang wacana yang dibuat.

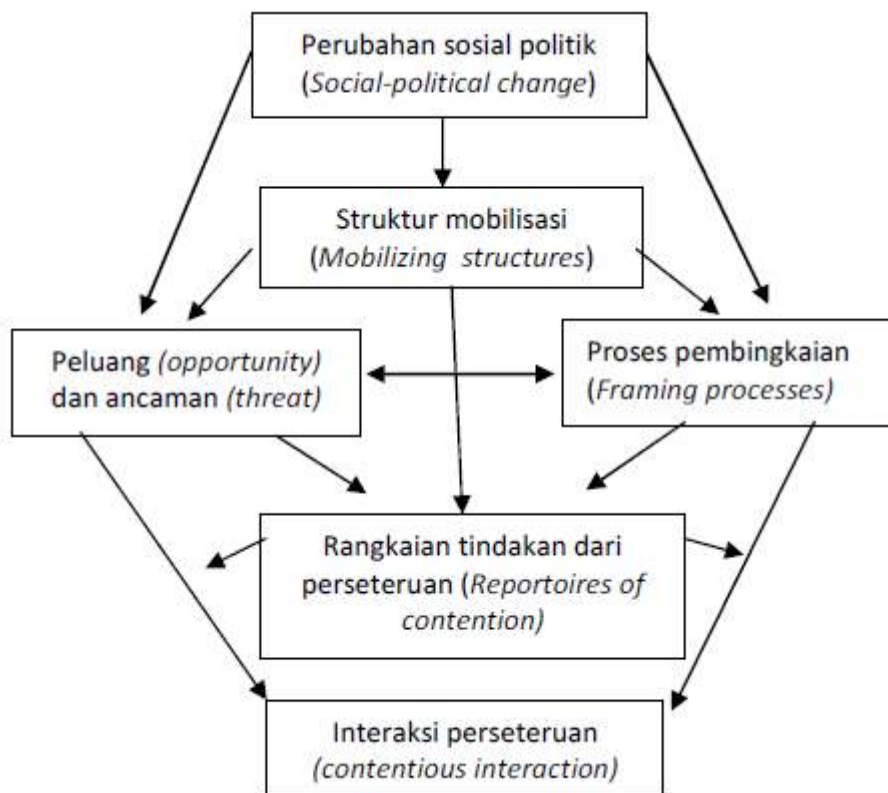
Dalam rangka melihat pola dan mekanisme dari kontentius politik dapat ditelusuri dengan menggunakan skema *resource mobilization*, *political opportunity* dan *political*

¹⁴⁴ Gerry Van Klinken, 2007. *Perang Kota Kecil : Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 17

¹⁴⁵ Charles Tilly, 2008. "Contentious Performances", Cambridge: Cambridge University Press, : 5.

framing.¹⁴⁶ Proses penelusuran ini dilakukan karena kontentius politik mensyaratkan konteks yang harus terpenuhi dari tiga konsep dasar tersebut. Ketiga fakta ini kemudian kemudian menjadi syarat dasar untuk berlakunya kontentius politik meskipun tidak terjadi secara bersamaan. Berikut adalah gambaran skema dasar teori gerakan yang digunakan untuk menjelaskan kontentius politik dalam sebuah sistem sosial masyarakat

Gambar 1: Skema Kontentius Politik¹⁴⁷



Lewat skema ini dinamika dalam kontentius politik dapat dilacak siapa aktor yang terlibat, sumberdaya yang digunakan, pendekatan yang digunakan, model wacana yang digulirkan dan struktur peluang yang terbuka. Kondisi ini seperti yang dikemukakan oleh Mc Adam dkk bahwa hal yang penting dalam kontentius politik adalah menemukan proses proses

¹⁴⁶ McAdam, Doug, John D. McCarthy and Mayer N. Zald (eds), 1996. *Comparative perspectives on social Movements: Political Opportunities, Mobilizing structure and Cultural Framing*, Ney York.,Cambridge University Press.

¹⁴⁷ Irawati, 2012. Identitas Kultural Dan Gerakan Politik: Kerapatan Adat Kurai Dalam Representasi Politik Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Andalas*. Volume 3 Nomor 1 Februari 2012

dan mekanisme kausal di antara faktor yang mendorong timbulnya gerakan. Analisa ini lebih melihat dinamika yang terjadi dalam gerakan dengan mengungkap mekanisme yang dilakukan oleh elit stakeholder untuk mengubah hubungan-hubungan diantara elemen-elemen tertentu dan cara-cara serupa. Untuk menerapkan pelbagai mekanisme tentu membutuhkan adanya proses diskursif dan framing politik terhadap aktor pengikut sebagai awal untuk menghasilkan pengaruh politik yang luas terhadap aktor lain dalam struktur peluang yang terbuka. Berikut adalah komponen yang dikemukakan oleh Charles Tilly untuk adanya gerakan politik dalam merespon sebuah kebijakan;¹⁴⁸

1. jaringan antara aktor-aktor yang berinteraksi secara informal;
2. sharing kepercayaan antar aktor
3. identitas dan solidaritas bersama dalam jaringan
4. otonomi politik dan aksi kolektif sebagai bentuk ketegangan.

Lewat pendekatan skema dan proses ini penelitian khususnya di Jakarta coba kami ulas proses kontestasi yang terjadi disana. Pendekatan kontestasi kami jadikan pegangan untuk menunjukkan adanya kedekatan yang sesuai dengan realita yang terjadi di sana. Pendekatan yang ada mencoba menganalisa delapan tingkatan setting sosial dalam gerakan sosial yang diungkapkan Tilly meliputi; level normal, tahap kegagalan pemerintah yang muncul, level pematangan kondisi yang menjadi *trigger event*, level take-off dimana isu menjadi agenda bersama, level isu muncul ke publik, isu menjadi agenda politik-publik memperdebatkan kebijakan yang menjadi *re-trigger event*. Perlawanan intensif antara pemegang kekuasaan dengan para aktivis. Kemudian tahap sukses dimana semua pemegang kekuasaan setuju dengan perubahan. Ini menjadi *re-trigger event* dan level terakhir dimana

¹⁴⁸ Charles Tilly, 2008. "Contentious Performances", Cambridge: Cambridge University Press

para aktivis melanjutkan perjuangan untuk melindungi dan memperluas kesuksesan.¹⁴⁹ Upaya untuk memahami dinamika yang terus berkembang dari aktor-aktor tersebut menjadi pijakan bagaimana kemudian isu konflik CSR ini kemudian muncul di Majakerta. Aktor yang kemudian berusaha disorot adalah warga Majakerta, Pertamina dan Pemerintah baik pusat dan daerah. Pola relasi antar aktor inilah yang akan mewarnai bagaimana dinamika konflik yang masih berlangsung bisa dijelaskan lewat kontentius politik dewasa ini.

Analisis:

1. Genealogi Contentius: Struktur mobilisasi, peluang dan pemingkanaan persoalan.

Isu utama persoalan dalam Warga Majakerta adalah bentuk model CSR yang akan diberikan Pertamina kepada warga Majakerta. Aktor yang terlibat dalam proses wacana awal tentang pengelolaan CSR adalah Pertamina, Pemda Indramayu dan Kelompok Warga Majakerta. Adanya persoalan ini diawali dari adanya struktur peluang yang muncul ketika pemerintah pusat mengeluarkan UU No 40 Tahun 2007 dengan mewajibkan perusahaan yang menyelenggarakan usaha terkait sumberdaya alam diminta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. UU No 40 Tahun 2007 ini yang kemudian mengalami multi tafsir di Majakerta siapa yang kemudian paling berhak menyelenggarakan program CSR dari Pertamina ini. Proses multi tafsir ini yang kemudian menyebabkan adanya ruang untuk melakukan diskursus wacana dan berkembang menjadi eskalasi argumentatif karena muncul rasa ketidakpuasan dari sebuah kebijakan dari aktor yang dominan.

Proses kontentius ini tidak terlepas dari cara pandang wacana yang digunakan dalam perbaikan kondisi sosial warga dari beberapa aktor yaitu Pemda Indramayu, Pertamina dan Kelompok warga Majakerta. Pemda Indramayu lebih memandang bahwa CSR Pertamina

¹⁴⁹ *Ibid.*

harus dikelola oleh pemerintah daerah sehingga penyelenggara utamanya adalah struktur birokrasi. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan bahwa pemda memiliki fungsi untuk menjamin keadilan warga seluruh Indramayu dari dana yang diberikan oleh Pertamina. Sedangkan Pertamina sendiri menginginkan bahwa penyelenggaraan CSR dikelola secara penuh oleh pemerintah Desa. Sedangkan Kelompok warga yang dipimpin oleh Pak Asmuni menginginkan CSR tersebut langsung diserahkan kepada warga Majakerta dengan dikelola secara kelompok.

Dalam pelaksanaan CSR diawal muncul aktor dominan siapa yang berhak menyelenggarakan yaitu Pemda Indramayu. Hal ini terlihat ketika Pemda pada tahun 2010 diberikan hak oleh Pertamina untuk mengelola dana sebesar 15 M. Namun demikian dana ini dianggap Kelompok Majakerta tidak memberikan efek langsung apapun terhadap warga. Selanjutnya Pemkab Indramayu kemudian mengklaim bahwa anggaran tersebut bukan dana CSR meskipun sudah dibantah oleh Pertamina sendiri. Ketidaktegasan Pemkab Indramayu dan Pertamina mengenai masalah itu menjadi jalan warga Majakerta melakukan kontentius politik.

Perbedaan cara pandang dan peluang ini yang kemudian menjadi *trigger event* bagi Pak Asmuni untuk melakukan mobilisasi terhadap warga Majakerta untuk mendorong adanya CSR langsung kepada warga secara kelompok. Isu bantuan sosial menjadi *take off* warga Majakerta menjadi agenda bersama untuk diperjuangkan terhadap pemda maupun Pertamina. Isu bantuan langsung lewat CSR ini kemudian dengan mudah direspon untuk melakukan memobilisasi karena persoalan kondisi warga Majakerta sendiri yang masih miskin dan terbatas tingkat ekonominya. Meskipun berdekatan langsung dengan daerah pengelola minyak Pertamina Revenery VI Balongan namun sebagian besar masyarakatnya hanya berprofesi sebagai buruh, baik buruh tani, buruh nelayan, maupun buruh proyek bangunan, meskipun ada beberapa orang lainnya yang memang menjadi petani (memiliki

sawah) maupun nelayan (memiliki perahu dan alat tangkap). Dengan pekerjaan tersebut, rata-rata penghasilan mereka hanya akan habis untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari (tidak bisa digunakan untuk *saving*). Tidak ada perubahan standar ekonomi yang nyata meskipun Pertamina menjadi tetangga mereka sejak 1980.

Keberadaan perusahaan malah kemudian banyak menggeser bentuk pekerjaan masyarakat yang awalnya hanya berkuat pada nelayan dan petani harus mencari alternatif lain. Lahan pertanian yang mereka miliki sebagian besar kemudian beralih menjadi milik Pertamina sedangkan aktivitas perikanan di pesisir menurun karena adanya hilir mudik perahu tangker yang membawa batu bara dan minyak mentah. Keterbatasan ruang gerak pekerjaan ini kemudian diperparah dengan kondisi lainnya seperti rusaknya kondisi lingkungan pesisir, adanya pencemaran pantai dan laut akibat dari tumpahan minyak, gas limbah produksi yang keluar setiap saat dan mengganggu kesehatan saluran pernapasan masyarakat; suara mesin produksi yang mengganggu karena terdengar sangat keras dan bising di malam hari; tercemarnya air sumur warga; serta getaran besar yang menggetarkan rumah warga jika mesin sedang beroperasi besar-besaran, yakni 3 sampai 4 bulan sekali. Beberapa persoalan ini menjadi ancaman langsung dari keberlanjutan warga Majakerta untuk tinggal dan menetap dimasa mendatang. Kondisi ini sangat penting untuk menjadi pertimbangan karena ancaman kemiskinan dan keselamatan menjadi persoalan warga Majakerta. Warga merasa harus menerima efek ketidakberuntungan bertetangga dengan perusahaan negara yang notabennya wajib memberikan perlindungan bagi *citezenship*.

Wacana bantuan sosial yang bisa didapatkan dari Pertamina lewat gerakan sosial dari Majakerta ini kemudian muncul menjadi isu publik yang dipahami bersama. Ada serangkaian *politik framing* yang digunakan oleh elit seperti Pak Asmuni terhadap warga. Misalnya adanya wacana tentang kurangnya transparansi dan pemerataan pengelolaan Pemda yang kemudian disuarakan pada level Pemda. Padahal sebagai wilayah ring I Majakerta

berhak mendapatkan bantuan yang lebih layak. Namun bantuan itu hanya jatuh pada elit pemerintah daerah saja. Wacana untuk menggeser dari pengelolaan oleh pemerintah daerah langsung ke masyarakat menjadi cara *re-trigger event* dari gerakan sosial yang semakin kencang. Warga menginginkan adanya bantuan langsung yang bisa diakses oleh mereka dari besaran yang disediakan oleh Pertamina.

Selain itu wacana untuk menghilangkan peran pemda, wacana lain yang digulirkan kelompok Pak Asmuni adalah berusaha menghilangkan kendali pemerintah Desa Majakerta dalam proses pelaksanaan CSR. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa dianggap kurang memberikan perhatian kepada rakyat kecil Majakerta. Pemerintah Desa lebih tersandera kepentingannya sebagai makelar proyek yang selama ini mendapatkan bantuan langsung dari Pertamina. Selama ini proses pembangunan fasilitas dan infrastruktur warga dari Pertamina seperti pengaspalan jalan desa (dari pusat pemerintahan desa menuju laut); pembenahan jalan-jalan kecil dengan memasang *paving blok*; pembangunan *break water*, pembangunan drainase; pemberian lahan sawah; perbaikan gedung sekolah (SD dan TK); perbaikan gedung Balai Desa; pembangunan Madrasah lebih banyak diurus oleh pemerintah desa. Warga sangat sangat minim dilibatkan dalam proses pembangunannya. Hal lain yang kemudian dikritisi adalah disfungsi kelembagaan organisasi pemerintah Desa seperti BPD, LPM, PKK, dan Karang Taruna karena terkooptasi oleh nalar pemburu proyek yang berasal dari Pertamina. Rangkaian eskalasi persoalan yang dialami warga yang selanjutnya menjadi modalitas elit seperti Pak Asmuni untuk melakukan mobilisasi terhadap warga.

Politik framing dengan memproduksi wacana yang terus berkembang menjadi kunci proses mobilisasi warga Majakerta. Pak Asmuni sebagai elit utama di Majakerta menggunakan jaringan yang berasal dari buruh nelayan, buruh tani, buruh industri tidak tetap di Pertamina dan buruh-buruh nelayan kecil di Majakerta. Merekalah yang kemudian menjadi anggota yang tanpa sadar mudah dimobilisasi karena dijanjikan bantuan langsung dari

Pertamina apabila ikut berjuang bersama menyuarakan kepentingan bantuan sosial. Wacana ini kemudian digulirkan agar mudah dicerna sehingga kelompok-kelompok tersebut menyebarkannya ke teman, saudara, keluarga dan tetangganya sehingga terbangun jaringan yang kuat dan solid antara aktor-aktor yang berinteraksi secara informal tersebut. Kekuatan hubungan ini ditentukan tumbuhnya kepercayaan diantara kelompok-kelompok kecil Majakerta terhadap wacana-wacana yang diproduksi dan digulirkan oleh Pak Asmuni semakin mendekati kenyataan. Kelompok ini adalah *subjection-subjection* yang mengikuti wacana Pak Asmuni sehingga tanpa sadar mengembangkan identitas dan solidaritas bersama dalam wadah sebuah jaringan yang memperjuangkan bantuan langsung CSR Pertamina secara langsung kepada kelompok-kelompok warga.

2. Politik Repertoar di Majakerta

Karakter utama yang ditampilkan dalam teori Contentius ini adalah suatu teknik yang menjustifikasikan penggunaan metode konflik laten maupun terbuka (kekerasan fisik) terhadap kesadaran inti identitas kelompok yang bisa terbagi ke dalam beberapa grup berdasarkan kesamaan etnis, agama, kepercayaan maupun pandangan politik. Dalam menjalankan aksinya kelompok mengembangkan apa yang disebut sebagai *repertoire*, istilah ini bukan merujuk pada istilah musik dalam paduan suara tetapi merujuk pada sebuah metode aksi gerakan yang dilaksanakan berulang-ulang, terencana dan terstruktur, atau biasa disebut sebagai taktik dalam tahapan gerakan. Bentuk *repertoire* sendiri beragam bentuknya antara lain dapat dilakukan dengan: petisi, festival, demonstrasi, konfrontasi, pertemuan, kekerasan ringan, sampai kekerasan berat.

Konflik yang terjadi di Desa Majakerta merupakan ketegangan yang sifatnya merata dan dinamis karena dipengaruhi oleh intrik kepentingan masing-masing kelompok. Baik itu antar masyarakat, antara masyarakat dengan tokoh masyarakat, antara tokoh

masyarakat dengan pemerintah, dengan pihak PT Pertamina VI Balongan, maupun antar pemerintah itu sendiri. Akan tetapi konflik yang terjadi tersebut bersifat laten, artinya konflik yang tidak terlihat secara terang-terangan. Penyebab adanya konflik laten tersebut adalah adanya pendistribusian bantuan maupun program yang tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat.

2.1.Repertoar ke Pertamina

Model politik repertoar yang digunakan oleh kelompok masyarakat di Majakerta adalah lewat demonstrasi massa, penutupan akses jalan, dan aksi kekerasan. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 2010 sempat terjadi demonstrasi besar yang dilakukan masyarakat untuk menuntut Pertamina untuk mengeluarkan CSR kepada warga. Hal ini dipicu adanya dampak serius pencemaran minyak mentah Pertamina di laut Jawa pada September 2008. Musibah ini menyebabkan terganggu aktivitas ekonomi nelayan karena mereka tidak dapat melaut. Demonstrasi menjadi pilihan tidak terlepas dari kondisi, cara dan waktu yang memberikan peluang untuk menuntut adanya CSR langsung terhadap warga Majakerta. Warga mulai sadar bahwa keberadaan Pertamina di Majakerta dalam 20 tahun belakangan belum memberikan manfaat besar apapun bagi kemajuan Desa. Pertamina tidak memiliki komitmen apapun untuk memberikan share kepada warga sekitar sehingga perlu ditekan agar sadar akan posisinya dalam ruang sosial di Balongan.

Beberapa kali warga melakukan dialog dengan pihak Pertamina Balongan mengenai tuntutan mereka akan tetapi kurang memberikan hasil. Sampai akhirnya mereka melakukan aksi demonstrasi kepada PT Pertamina Balongan. Ratusan warga Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berunjuk rasa di depan pintu I kilang RU VI Balongan pada 7 Februari 2011.¹⁵⁰ Unjuk rasa warga yang tinggal di

¹⁵⁰ Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2011/02/07/340/422150/warga-tuntut-kompensasi-ke-pertamina-balongan>

ring I kilang Balongan ini untuk menuntut kompensasi atas sejumlah dampak pengolahan kilang RU VI. Massa meminta warga yang bertempat tinggal di radius 500 meter dari lokasi kilang mendapatkan kompensasi yang sepadan. Aksi massa dilakukan sejak pukul 07.00 WIB. Massa bahkan sempat menghadang pekerja yang akan masuk ke area kilang. Aksi baru mereda setelah aparat Kepolisian meminta pengunjung rasa untuk tidak memblokir pintu I dan memperbolehkan pekerja masuk. Massa bertahan selama beberapa jam di lokasi pintu I Balongan. Aksi ini baru berakhir setelah wakil warga diterima manajemen Pertamina RU VI Balongan. Dalam pertemuan, Pertamina RU VI Balongan berjanji akan mengakomodasi tuntutan warga Desa Majakerta. Setelah adanya kepastian akan tuntutan mereka akan dikabulkan, massa langsung membubarkan diri.

Selang beberapa waktu kemudian, aksi tersebut tidak mendapatkan respon dari Pertamina sehingga warga melakukan aksi demonstrasi kembali pada 7 Mei 2011.¹⁵¹ Warga Desa Majakerta juga berunjuk rasa menuntut kompensasi kepada PT Pertamina Balongan, mengingat posisi pemukiman warga desa itu berdekatan dengan kilang. Sehingga kemungkinan warga Desa Majakerta itu paling beresiko tercemar limbah berbahaya, dibandingkan warga desa lainnya.

Karena belum ada tindak lanjut dari pemerintah, akhirnya *ekskalasi conflict* antara keduanya semakin membesar. Hal tersebut terbukti dengan adanya warga yang menuntut adanya ganti rugi kepada PT Pertamina Balongan sampai terlibat bentrok dengan petugas keamanan kilang minyak Pertamina. Aksi tersebut sampai mengakibatkan ada warga yang terluka. Bentrokan dipicu kekecewaan warga terhadap kepala desa yang tidak bisa menyuarakan aspirasi warganya kepada Pertamina. Dalam aksinya kali ini warga menuntut

¹⁵¹ Diakses dari <http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/05/07/warga-merasa-kehadiran-kilang-bbm-balongan-tak-memberi-apa-apa-dan> dan <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/05/08/1kulvf-ratusan-warga-blokir-pertamina-balongan>

kompensasi pendidikan, serta lingkungan dan kesehatan, karena selama kilang minyak milik PT Pertamina Balongan beroperasi, ekonomi mereka semakin terpuruk.¹⁵²

Unjuk rasa warga juga terjadi pada 16 Mei 2013 dan berlangsung ricuh. Seperti dilansir oleh Metro TV berikut: “Kericuhan bermula ketika pengunjung rasa bentrok dengan aparat yang berjaga-jaga di pintu gerbang utama Kilang Balongan. Massa bermaksud menemui perwakilan Pertamina, dengan merangsek barikade polisi. Tidak berhasil merangsek, pengunjung rasa mengejar kendaraan angkutan bahan bakar milik Pertamina. Mereka juga melarang kendaraan pekerja memasuki kawasan kilang minyak Balongan.”¹⁵³ Disebutkan pula bahwa aksi tersebut merupakan puncak kemarahan warga atas tidak adanya ganti rugi pencemaran limbah minyak mentah yang merusak ekosistem dan mata pencaharian nelayan.

2.2.Repertoar ke Pemerintah Desa

Konflik antara masyarakat dengan tokoh masyarakat juga terjadi, yaitu berupa hilangnya kepercayaan dari masyarakat kepada tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan mereka. Semua faktor penyebabnya sama, yakni tokoh masyarakat menjual nama masyarakat maupun lembaga masyarakat yang dipimpinnya untuk mendapatkan mata pencaharian dari Pertamina RU VI Balongan. Kebanyakan dari tokoh masyarakat menjadi media masuknya program bantuan dari Pertamina RU VI Balongan ke Desa Majakerta. Setelah program selesai, mereka berbondong mencari ‘proyek’ yang bisa dikerjakan lagi untuk menjadi mata pencaharian. Kemudian yang diikutsertakan dalam pekerjaan tersebut hanya sanak keluarga si tokoh, tanpa mengajak masyarakat lainnya.

¹⁵² Diakses dari http://news.mnctv.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12273

¹⁵³ Diakses dari <http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/05/17/6/177470/Warga-Desa-Cemara-Tuntut-Ganti-Rugi-Pencemaran-Kilang-Balongan>

Tidak hanya itu, sebelum pelaksanaan demonstrasi masyarakat diiming-imingi nominal rupiah oleh tokoh masyarakat, yang juga sebagai penggerak demonstrasi. Akan tetapi setelah bantuan dari PT Pertamina cair, hanya sanak saudara dan orang-orang kepercayaan dari tokoh tersebut yang mendapatkan bantuan. Dari sanalah kepercayaan masyarakat sedikit demi sedikit mulai luntur.

Selain konflik antara masyarakat dengan tokoh masyarakat, juga muncul konflik laten antar tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Penyebabnya adalah adanya perebutan mata pencaharian yang didapatkan dari PT Pertamina VI Balongan. Kondisi seperti ini menunjukkan adanya monopoli oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

Seperti dikabarkan oleh Indramayu Post pada 7 Maret 2011 terdapat aksi demo rusuh antar sekelompok warga pendukung dan penentang kepemimpinan Dasuki, Kades Majakerta. Aksi tersebut menyebabkan keamanan di desa tersebut terganggu, bahkan pelayanan masyarakat pun juga ikut terganggu. Demo tersebut terkait dengan kecurigaan warga bahwa Dasuki sebagai Kades Majakerta terlibat dalam penyelewengan dana bantuan yang diberikan oleh Pemkab Indramayu terkait dengan bantuan yang diberikan oleh PT Pertamina Balongan.¹⁵⁴

2.3.Repertoar untuk Pemda Indramayu

Konflik eksternal yang terjadi antara pemerintah Desa Majakerta dengan pemerintah Kabupaten Indramayu disebabkan karena pendistribusian bantuan CSR PT Pertamina VI Balongan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dianggap tidak adil menurut Pemerintah Desa Majakerta. Dana yang diperoleh tersebut didistribusikan secara merata ke semua desa di Indramayu, tanpa memperhitungkan besar kecilnya nominal yang didasarkan pada dampak yang dirasakan masyarakat tiap desa. Dengan keputusan pendistribusian seperti itu, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa Majakerta tidak mau

¹⁵⁴ Diakses dari <http://www.indramayupost.com/2011/03/satu-kompi-brimob-jaga-desa-majakerta.html>

menerimanya, sehingga konflik tersebut muncul. Tak hanya itu, pemerintah kabupaten membela diri bahwa uang yang didistribusikan tersebut adalah uang hutang pajak Pertamina yang sedang dicicil sebesar 15 miliar. Sedangkan ketika Pemerintah Desa Majakerta mengonfirmasikannya pada pihak Pertamina RU VI Balongan, didapatkan jawaban bahwa dana tersebut merupakan dana CSR yang diserahkan ke masyarakat Indramayu dan diharapkan bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah kabupaten.

Akibat kejadian tersebut kemudian menimbulkan lunturnya kepercayaan tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa Majakerta kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu. Meskipun masalah tersebut sudah diselesaikan, namun efeknya tidak berhenti begitu saja. Sampai saat ini, pemerintah desa sudah susah untuk memercayai pemerintah kabupaten sebagai payung Desa Majakerta.

Warga Balongan pun menjadi ikut tidak memercayai pemerintah. Hal tersebut terlihat dari adanya aksi demo yang mereka lakukan pada 16 Maret 2011 lalu. Para pengunjung rasa menuntut pihak Pertamina membatalkan menyerahkan dana CSR ke Pemkab Indramayu, karena penggunaannya dianggap tidak jelas dan tidak transparan. Pengunjung rasa memblokir pintu masuk dan keluar kendaraan yang akan mengisi BBM itu. Karena tuntutan mereka tak digubris Pertamina, pengunjung rasa kehilangan kesabaran, sehingga mereka mengamuk mendorong-dorong pagar pembatas menuju Depot Pengisian BBM milik Pertamina di Balongan. Dana CSR dari Pertamina yang diserahkan ke Pemkab Indramayu tahun ini jumlahnya Rp15 miliar akan tetapi penggunaannya tidak jelas dan tidak transparan.¹⁵⁵

Kesimpulan

¹⁵⁵ Diakses dari <http://www.indramayupost.com/2011/03/warga-demo-di-depo-pertamina-balongan.html>

Memandang konflik yang terjadi di Balongan melalui *Contentious Politics* dapat dilihat ketika terdapat peluang yang diperebutkan banyak pihak, yaitu berupa dana bantuan CSR yang akan dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari PT Pertamina VI Balongan. Perebutan peluang tersebut oleh berbagai pihak, baik itu masyarakat, tokoh masyarakat, Pemdus dan Pemkab membuat konflik yang terjadi semakin bertambah kompleks. Perguliran wacana dan isu yang berkembang dalam masyarakat pun membuat eskalasi konflik semakin membesar, dan dimanfaatkan beberapa oknum untuk memobilisasi massa sehingga terjadi pergerakan. *Repertoar* yang digunakan dalam *contentious politics* dalam kasus ini pun bermacam-macam, mulai dari dialog (akan tetapi tidak berhasil) sehingga memunculkan demonstrasi massa, penutupan jalan, sampai kekerasan. Dan karena belum ada temu titik dari upaya-upaya penyelesaian masalah konflik tersebut, maka konflik masih terus berlanjut di kawasan Balongan hingga saat ini.

Daftar Pustaka

- Frans de Djalong, 2010. *Konflik Pertambangan: Mengelola Paradok (Perspektif Demokrasi Politik)*. Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian. Yogyakarta: PSKP Universitas Gadjah Mada
- Irawati, 2012. *Identitas Kultural Dan Gerakan Politik: Kerapatan Adat Kurai Dalam Representasi Politik Lokal*. Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Andalas. Volume 3 Nomor 1 Februari 2012
- Klinken, Gerry van. 2007. *Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal, dan Demokratisasi di Indonesia*. Terj. Bernard Hidayat. Jakarta. KITLV dan Yayasan Obor.
- Laporan Sosial Mapping Jurusan PSdK Fisipol UGM Tahun 2013
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow and Charles Tilly. 2001. *Dynamics of Contention*. New York. Cambridge University Press.
- McAdam, Doug, John D. McCarthy and Mayer N. Zald (eds), 1996. *Comparative perspectives on social Movements: Political Opportunities, Mobilizing structure and Cultural Framing*, New York: Cambridge University Press.
- Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. New York: Cambridge University Press